

Pelaksanaan Program BLT-DD dalam Mengurangi Kemiskinan

Oleh:

Shinta Ana Mulisalsabilla

Isnaini Rodiyah

Administrasi Publik

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Mei, 2026

Pendahuluan

Pembangunan berkelanjutan di tingkat desa menjadi fokus penting dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional. Sebagai bentuk komitmen Indonesia terhadap agenda global, pemerintah telah mengintegrasikan prinsip-prinsip Sustainable Development Goals (SDGs) ke dalam kerangka pembangunan desa melalui berbagai regulasi dan kebijakan.

Implementasi Program BLT-DD di Indonesia diperkuat melalui berbagai dasar hukum yang mengatur penyaluran, pengelolaan, serta pengawasan dana bantuan kepada masyarakat desa, salah satunya ialah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Keuangan (PMK), serta Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang mengatur prioritas penggunaan Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Dasar hukum tersebut menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam menyalurkan bantuan secara tepat sasaran, transparan, dan akuntabel guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengurangi dampak kemiskinan di desa.

Pemerintah Desa Sugihwaras, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo mengimplementasikan program BLT-DD, sebagai upaya guna mengurangi tingkat kemiskinan dalam kerangka Sustainable Development Goals (SDGs).

Data Pendukung

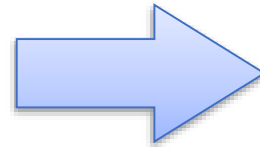


Gambar 1. SDGs Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo
Sumber: [Website Resmi Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo](#)

Berdasarkan data SDGs Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, pada tujuan “Desa Tanpa Kemiskinan” diperoleh skor sebesar 53,19. Nilai tersebut menunjukkan bahwa upaya pengurangan kemiskinan di Desa Sugihwaras berada pada kategori sedang dan masih memerlukan peningkatan dalam beberapa aspek kesejahteraan masyarakat.

Gap Masalah

PERMASALAHAN



- Dari hasil observasi, pendataan yang kurang efektif sehingga tidak merata dalam menerima bantuan karena kurangnya transparansi hasil pendataan sehingga bantuan tersebut tidak tepat sasaran.
- Sementara, berdasarkan Peraturan Menteri Desa (Permendes) Nomor 13 Tahun 2020, pemerintah desa hanya diperbolehkan mengalokasikan sebagian dana desa untuk program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), yaitu maksimal 25% dari total Dana Desa yang dimiliki. Karena jumlah dana yang digunakan dibatasi, maka tidak semua warga miskin dapat menerima bantuan BLT-DD.

Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

Rumusan Masalah:

Implementasi Program BLT-DD dalam Mengurangi Kemiskinan

Pertanyaan Penelitian:

Bagaimana Implementasi Program BLT-DD dalam Mengurangi Kemiskinan ?

Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama, Isnaini Rodiyah (2014) berjudul "*Implementasi Kebijakan Program Padi Miskin (Raskin) di Desa Kejapanan, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan*". Peneliti membahas implementasi program Raskin sebagai upaya pemerintah untuk mengurangi kemiskinan di tingkat desa. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas implementasi kebijakan Raskin dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat penerima manfaat. Penelitian ini mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan program, termasuk aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasa. Selain itu, peneliti juga menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses distribusi beras, di mana keterlibatan masyarakat dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun program Raskin telah memberikan bantuan yang signifikan kepada masyarakat miskin, namun masih ada tantangan dalam hal pemerataan dan pemahaman masyarakat terhadap mekanisme program.

Penelitian kedua, Ishartono dan Santoso Tri Raharjo (2016) dalam jurnal "*Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan Pengentasan Kemiskinan*". Dalam penelitian ini membahas isu kemiskinan yang dinilai krusial dan penanganan kemiskinan yang perlu dipahami secara komprehensif dan saling terkait dengan berbagai program dan kegiatan. Sesuai dengan Sustainable Development Goals (SDGs), tujuan pertama adalah No Poverty yang menjadi prioritas utama. Perserikatan Bangsa-Bangsa telah disepakati untuk menghapuskan kemiskinan dalam segala bentuk di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Dalam konteks ini, Indonesia terus berupaya untuk mencapai tujuan pertama atau mengentaskan kemiskinan.

Penelitian Terdahulu

Penelitian ketiga, Nanda Bayu Pratama, Eko Priyo Purnomo, dan Agustiara (2020) tentang "*Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta*", tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggali upaya yang dilakukan oleh pemerintah Yogyakarta dalam mendukung SDGs untuk mengatasi kemiskinan. Inisiatif ini akan menjadi indikator dalam pencapaian target pemberantasan kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa target pengentasan kemiskinan yang ditetapkan selama pelaksanaan MDGs, yaitu mengurangi kemiskinan sebesar 10,30%, belum berhasil dicapai oleh Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Oleh karena itu, selama masa implementasi SDGs, pemerintah daerah kembali menjadikan penurunan tingkat kemiskinan sebagai salah satu prioritas utama. Diharapkan dalam jangka waktu implementasi SDGs hingga tahun 2022, target penanggulangan kemiskinan yang ditetapkan dapat tercapai di kisaran 7-8%.

Penelitian keempat, Masta Dahlia Napitulu dkk (2020). "*Analisis Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Desa Bakal Gajah melalui Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*". Dalam penelitian ini dilakukan analisis terhadap implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) di Desa Bakal Gajah, Kecamatan Silima Punggapungga, Kabupaten Dairi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat mendukung pencapaian tujuan program SDGs di Desa Bakal Gajah. Dalam empat penelitian sebelumnya, terdapat perbedaan fokus penelitian dengan penelitian ini.

Metode

Jenis Penelitian	Penelitian kualitatif dengan metode deskriptif
Fokus Penelitian	Implementasi Program BLT-DD dalam Mengurangi Kemiskinan, menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III dikutip dari Tesis Maryam Musawa (2009).
Lokasi Penelitian	Desa Sugihwaras, Kabupaten Sidoarjo
Teknik Penentuan Informan	<i>Purposive Sampling</i> (Kepala Desa, Kasi Pelayanan, dan Masyarakat Penerima Manfaat)
Teknik Pengumpulan Data	Observasi, wawancara, dan dokumentasi

Hasil dan Pembahasan

1. Komunikasi

Komunikasi dalam pelaksanaan program BLT-DD di Desa Sugihwaras dilakukan melalui musyawarah dan koordinasi antara pemerintah desa, BPD, RT/RW, dan masyarakat. Hal ini bertujuan agar informasi mengenai program dapat dipahami dengan jelas oleh masyarakat sehingga pelaksanaan bantuan berjalan lebih tepat sasaran.



Gambar 2. Sosialisasi Penyaluran BLT-DD

Sumber: Website Resmi Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara, Kasi Pelayanan Nur Amiril, S.AP menyampaikan bahwa:

“Terkait komunikasi ke bawah atau ke target, kami sudah melakukan musyawarah dengan BPD dan seluruh RT/RW di Desa Sugihwaras. Jadi intinya setiap kali ada program baru, kami selalu melakukan musyawarah dengan pihak sasaran.”

Selain itu, pemerintah desa juga melakukan koordinasi sebelum menjalankan program prioritas penggunaan dana desa. Pernyataan tersebut diperkuat dengan hasil wawancara berikut:

“Ya Bu, sebelum kita ingin melaksanakan program prioritas penggunaan dana desa, kita sudah berkomunikasi dengan kepala RT dan RW serta stakeholder terkait.”

Hasil dan Pembahasan



Gambar 2. Infografis BLT-DD

Sumber: https://kemendes.go.id/berita/content/detail_infografis/BLT%20DD

Hasil dan Pembahasan

2. Sumber Daya

Sumber daya menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi BLT-DD, baik dari segi sumber daya manusia, anggaran, maupun fasilitas pendukung. Pemerintah Desa Sugihwaras memiliki struktur pelaksana program yang jelas, yaitu Kepala Desa sebagai penanggung jawab, Sekretaris Desa sebagai verifikator, dan Kasi Kesra sebagai pelaksana program. Berdasarkan hasil wawancara, Nur Amiril, S.AP menyampaikan bahwa:

“Alhamdulillah untuk menjalankan program ini tim solid dan tidak terlalu keberatan, meskipun ada kendala di awal, namun kita bisa menyelesaikannya sesuai target yang telah ditentukan.”

No.	Tahun	Total Anggaran	Jumlah Penerima KPM
1.	2022	Rp 493.200.000	137 KK
2.	2023	Rp 115.200.000	32 KK
3.	2024	Rp 115.200.000	32 KK

Sumber: Pemerintah Desa Sugihwaras

Hasil dan Pembahasan

No.	Nama	Posisi Desa	Posisi Program BLT-DD
1.	Syaiful	Kepala Desa	Penanggung Jawab
2.	Moh. Sodiq	Sekretaris Desa	Verifikator
3.	Muchlisin	Kasi Kesra	Pelaksana

Sumber: Diolah dari Pemerintah Desa Sugihwaras

Hasil dan Pembahasan

Dari sisi sumber daya, Kasi Pelayanan, Nur Amiril, S.AP menyampaikan bahwa:

"Alhamdulillah untuk menjalankan program ini tim solid dan tidak terlalu keberatan, meskipun ada kendala di awal, namun kita bisa menyelesaikannya sesuai target yang telah ditentukan"



Gambar 4. Penyaluran BLT Tahap 1 Tahun 2025

Sumber: <https://www.sugihwaras.desa.id/artikel/2025/3/13/pembagian-blt-tahap-1-tahun-2025>

Hasil dan Pembahasan

3. Struktur Birokrasi

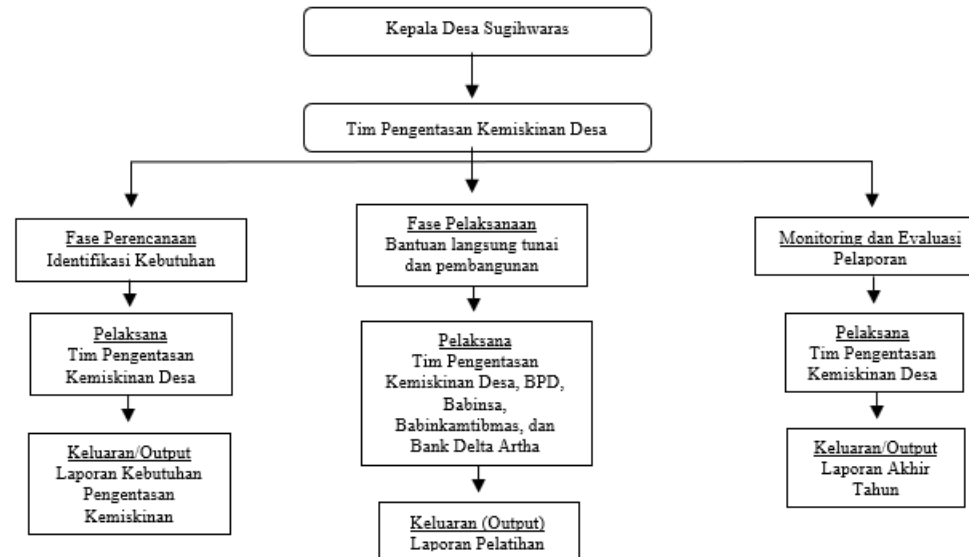
Pelaksanaan BLT-DD di Desa Sugihwaras dilaksanakan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengacu pada aturan dari Kemendes. Struktur birokrasi yang jelas membantu koordinasi antar perangkat desa sehingga pelaksanaan program berjalan lebih tertib dan terorganisir. Berdasarkan hasil wawancara, Nur Amiril, S.AP menyatakan bahwa:

“Untuk Standar Operasional Prosedur terkait kebijakan ini, kami mengacu langsung pada Standar Operasional Prosedur pelaksanaan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa.”

Pelaksanaan program dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Dalam tahap pelaksanaan, Tim Pengentasan Kemiskinan Desa bekerja sama dengan BPD, Babinsa, Babinkamtibmas, dan Bank Delta Artha untuk memastikan bantuan tersalurkan dengan baik. Dengan adanya struktur birokrasi yang jelas, penyaluran bantuan dapat dilakukan secara lebih transparan dan akuntabel.

Hasil dan Pembahasan

Tabel 2. Struktur Pelaksanaan Program BLT-DD di Ds. Sugihwaras Kec. Candi



Sumber: Diolah dari Pemerintah Desa Sugihwaras

Pada struktur diatas, menghasilkan koordinasi yang efisien dan pembagian tanggung jawab yang jelas. Kepala Desa memegang kewenangan tertinggi dalam pengambilan keputusan, diikuti oleh perangkat desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan RT/RW. BLT-DD di Desa Sugihwaras dilaksanakan dengan mengikuti Standard Operating Procedure (SOP) yang terstruktur dan rinci untuk setiap tahap. SOP ini langsung disampaikan oleh pemerintah desa kepada warga yang berhak menerima, sehingga bantuan tersebut dapat segera digunakan oleh masyarakat yang membutuhkan.

Hasil dan Pembahasan

4. Disposisi

Disposisi atau sikap pelaksana program menunjukkan adanya komitmen dan tanggung jawab aparat desa dalam menjalankan kebijakan BLT-DD. Pemerintah desa berupaya menjalankan program sesuai aturan agar bantuan dapat diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Berdasarkan hasil wawancara, Nur Amiril, S.AP menyampaikan bahwa:

“Disposisi didahului oleh pemerintah pusat untuk memberikan kode pencairan dana BLT-DD yang dibagi menjadi suku-suku satu kali, setelah itu pelaksana kegiatan meminta bendahara desa untuk melakukan proses pencairan dengan persetujuan kepala desa dan sekretaris desa.”

Data pendukung menunjukkan bahwa pelaksanaan BLT-DD dilakukan secara bertahap dan melalui prosedur yang jelas sebelum dana diberikan kepada masyarakat. Sikap positif dan komitmen aparat desa dalam menjalankan program menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan pengentasan kemiskinan di Desa Sugihwaras.

Hasil dan Pembahasan

Dalam konteks disposisi Desa Sugihwaras, Nur Amiril, S.AP menyatakan sebagai berikut, yaitu:

"Disposisi didahului oleh pemerintah pusat untuk memberikan kode pencairan dana BLT-DD yang dibagi menjadi suku-suku satu kali, setelah itu pelaksana kegiatan meminta bendahara desa untuk melakukan proses pencairan dengan persetujuan kepala desa dan sekretaris desa setelah tahap itu selesai baru kemudian bank dapat memberikan dana BLT DD kepada KPM"



Gambar 5. Pendampingan Oleh Perangkat Desa, BPD, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas

Sumber: Website Resmi Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo

Temuan Penting Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program BLT-DD di Desa Sugihwaras berperan penting dalam membantu mengurangi kemiskinan dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Program ini juga membantu meningkatkan daya beli masyarakat serta mendukung usaha kecil di desa. Keberhasilan implementasi program dipengaruhi oleh empat faktor utama menurut teori George C. Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi, dan disposisi. Komunikasi dilakukan melalui musyawarah antara pemerintah desa, BPD, RT/RW, dan masyarakat sehingga informasi program dapat tersampaikan dengan baik. Dari sisi sumber daya, pemerintah desa memiliki pembagian tugas yang jelas dan didukung oleh anggaran BLT-DD yang digunakan untuk membantu masyarakat miskin.

Selain itu, pelaksanaan program telah mengikuti SOP dari Kemendesra sehingga proses penyaluran bantuan berjalan lebih tertib dan transparan. Sikap dan komitmen aparat desa juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan program BLT-DD di Desa Sugihwaras.

Namun, penelitian menemukan masih terdapat kendala dalam pendataan penerima bantuan dan keterbatasan anggaran BLT-DD sehingga belum semua masyarakat miskin dapat menerima bantuan secara merata.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai implementasi program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dalam upaya pengentasan kemiskinan berdasarkan teori George C. Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi, dan disposisi.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi Pemerintah Desa Sugihwaras dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan program BLT-DD agar lebih tepat sasaran dan transparan. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah, peneliti selanjutnya, maupun masyarakat dalam memahami pelaksanaan program bantuan sosial desa sebagai upaya mendukung pengurangan kemiskinan dan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Sugihwaras, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo dinilai cukup efektif dalam membantu mengurangi kemiskinan dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Program ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui bantuan tunai yang digunakan untuk kebutuhan pokok serta mendukung daya beli masyarakat.

Keberhasilan pelaksanaan program dipengaruhi oleh empat faktor utama berdasarkan teori George C. Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi, dan disposisi. Komunikasi yang baik antara pemerintah desa dan masyarakat, sumber daya yang memadai, struktur birokrasi yang jelas, serta komitmen aparat desa menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan implementasi program BLT-DD.

Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, terutama pada proses pendataan penerima bantuan dan keterbatasan anggaran BLT-DD sehingga belum seluruh masyarakat miskin dapat menerima bantuan secara merata. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan akurasi pendataan, koordinasi antar pihak terkait, dan optimalisasi pelaksanaan program agar bantuan sosial dapat lebih tepat sasaran dan efektif dalam mendukung pengentasan kemiskinan di Desa Sugihwaras.

Referensi

- [1] Y. Yu dan J. Huang, "Pengurangan Kemiskinan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Abad ke-21: Analisis Bibliometrik," *Dahi. Umum.*, vol. 6, no. Oktober, hlm. 1–15, 2021.
- [2] Turno, Fakhruddin, Joko Sutarto, Asrori, "Implementasi Pendidikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGS) Berbasis Dana Desa di Kabupaten Batang," *J. Inf. Syst. Eng. Manag.*, vol. 10, no. 3, hlm. 1199–1206, 2025.
- [3] F. Irhamsyah, "Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan Dampaknya terhadap Ketahanan Nasional," *J. Lemhannas RI*, vol. 7, no. 2, hlm. 45–54, 2020.
- [4] M. Hakim, M. Milzam, A. T. Suseno, A. D. Anjarini, dan R. Afif, "Pemberdayaan Pengelolaan Sumber Daya Desa Bumdes Berkah Jaya Karangasem melalui Penyelenggaraan Digital Marketing," *J. Abdimas BSI J. Pengabd. To Masy.*, vol. 7, no. 1, hlm. 146–158, 2024.
- [5] T. R. Hariandja dan N. T. Budiman, "Transparansi dalam Pelaksanaan Bantuan Tunai Langsung (BLT) untuk Dana Desa," *Ijlil*, vol. 1, no. 3, hlm. 263–277, 2021.
- [6] I. Ishartono, B. Rusyidi, dan S. T. Raharjo, "Potret Orang Miskin dari Perspektif Kekuasaan," *Bagikan Soc. Work J.*, vol. 7, no. 1, hlm. 46, 2017.
- [7] A. B. Darmawan, "Implementasi Kebijakan SDGs Pemerintah Daerah dalam Mengelola Ketahanan Pangan di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Desa Pandak, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas)," *J. Ketahanan Nas.*, vol. 29, no. 2, hlm. 145, 2023.
- [8] A. Haris, A. Anas, M. Nurjaya, H. Iriawan, dan M. Tang Abdullah, "Strategi dan Implementasi Kebijakan Program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) untuk Pengentasan Kemiskinan di Desa," *J. Anal. Kebijakan. dan Layanan Publik*, vol. 10, no. 1, hlm. 65–78, 2024.
- [9] S. E. Januarti dan I. Rodiyah, "Implementasi Kebijakan Program Padi Miskin (Raskin) di Desa Kejapanan, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan," *JKMP (Jurnal Kebijakan. dan Manaj. Publik)*, vol. 2, no. 1, 2014.
- [10] S. E. Pasaribu, I. Dewa, A. P. Wirantari, N. Putu, dan A. Prabawati, "Efektivitas Program Bantuan Beras Miskin (Raskin) di Desa Lokasari, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem," *Hukum Etika J. Bus. Notaris (ELJBN)*, vol. 2, no. 1, hlm. 2988–1293, 2024.

Referensi

- [11] G. Z. Dzulqarnain, D. Meigawati, dan Y. F. Basori, "Implementasi Program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kota Sukabumi," *Prof. J. Komun. Public Adm.*, vol. 9, no. 1, hlm. 109–116, 2022.
- [12] D. D. Ayuningtyas dan S. Wibawani, "Dalam Pemberdayaan Masyarakat Peran Badan Usaha Desa (Bumdes)," vol. 13, no. 3, hlm. 281–286, 2022.
- [13] Sutrisno, D. T. Kartono, dan A. Demartoto, "Strategi Implementasi SDG di Tingkat Desa dalam Menghadapi Tantangan Pembangunan Berkelanjutan dalam Skala Nasional (Studi Kasus di Desa Klampok, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro)," *Konferensi Ser.*, vol. 2, no. 1, hlm. 2987–5439, 2024.
- [14] Z. Saroh, A. dan P. Panjaitan, R., "Desa Terdampak Covid-19: Melihat Implementasi Bantuan Tunai Langsung untuk Dana Desa (Blt-DD)," *J. Adm. Negara*, vol. 27, no. 2, hlm. 110–134, 2021.
- [15] B. Prakoso, R. Himmah, dan F. K. Illahi, "Jurnal Lanskap Politik Jurnal Lanskap Politik," *Lanskap Polit.*, vol. 1, no. September 2023, hlm. 107–133, 2024.
- [16] I. G. K. C. B. Anta Kusuma dan Y. T. S. Simanungkalit, "Implementasi Insentif Perpajakan Menurut Model G Edward III," *J. Pajak dan Keuangan. Negara*, vol. 3, no. 2, hlm. 236–248, 2022.
- [17] D. Setyawan, A. Priantono, dan F. Firdausi, "Model George Edward III," *Publicio J. Ilm. Polit. Kebijaksanaan. dan Sos.*, vol. 3, no. 2, hlm. 9–19, 2021.
- [18] B. S. S. R. BPS Kabupaten Sidoarjo, "Kabupaten Candi dalam Angka Kabupaten Candi Pada Gambar 2024," vol. 28, no. 2, hlm. 2315–2315, 2024.
- [19] N. M. Nellis, Z. Fadhly, dan S. Jahriah Situmpol, "Implementasi Kebijakan Pembangunan SDGs di Desa di Era Covid 19 di Kabupaten Simeulue," *J. Ilmu Pengetahuan Laksamana Negara ASIA (Asosiasi Ilmuwan Laksamana Negara)*, vol. 11, no. 1, hlm. 41–55, 2023.
- [20] BG Gupta, "Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)," *Keberlanjutan Perkotaan.*, vol. Bagian F4098, hlm. 41–65, 2024.

Referensi

- [21] S. A. Oktaviana, "Implementasi Program Sustainable Development Goals (SDGS) oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam Mengurangi Kemiskinan," hlm. 1–93, 2023.
- [22] A. Nawir, S. Syamsuddin, dan J. Jusniaty, "IMPLEMENTASI PROGRAM TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SDG) DESA POLEWALI DALAM MENGURANGI KEMISKINAN," *Demokrasi*, Vol. 1, No. 3, hlm. 1–18, 2022.
- [23] F. I. zaini, "Kebijakan SDGS dalam Pengentasan Kemiskinan di Masyarakat Pedesaan," 2021.
- [24] D. Triyanto, K. Kismartini, H. Aprianty, dan P. Novelia, "Penerapan Aplikasi Registrasi Antrean Paspor Online dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan Publik di Bengkulu," *Perspektif*, vol. 11, no. 2, hlm. 527–532, 2022.
- [25] C. H. Sasuwuk, F. D. Lengkong, dan N. A. Palar, "Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Tunai Langsung ke Dana Desa (Blt-DD) di Masa Pandemi Covid-19 di Desa Laut, Kabupaten Minahasa," *Jepang*, vol. VII, no. 108, hlm. 78–89, 2021.
- [26] S. Aseh, T. F. Gafar, dan Z. Zamhasari, "Permasalahan Penyaluran Bantuan Tunai Langsung untuk Dana Desa (BLT DD) pada tahun 2020," *JOELS J. Terpilih. Pemimpin.*, Vol. 2, No. 1, hlm. 30–40, 2021.
- [27] Sri Handayani, Syaiful Arif, Galih Moh.Husein, Siti Ayu Wulandari, and Muhammad Halimy, "SDGs Achievement in Village Government Institutions (Stunting Prevention Study in Tambakasri Village, Sumbermanjing Wetan District, Malang Regency)," *J. Gubernur Innov.*, vol. 5, no. 1, hlm. 1–10, 2023.
- [28] H. Lahuddin, "Desain Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Penerima Bantuan Program Pemerintah," *Sejenisnya. J. Ilm.*, vol. 8, no. 1, hlm. 63–68, 2016.

